

DETERMINAN *FISCAL STRESS* PADA PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU SUMATERA

Heny Amanda Putri¹⁾, Sukmini Hartati²⁾, Yuli Antina Aryani³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

*¹⁾ *Corresponden author:* henyamandaputri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh desentralisasi fiskal, belanja pegawai, dan belanja modal terhadap *fiscal stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian menggunakan 30 sampel dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2019 hingga 2021. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yakni Laporan Realisasi Anggaran dari “Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Data tersebut diunduh dari situs www.e-ppid.bpk.go.id. Penelitian menggunakan analisis data panel dengan analisis regresi multiplier, serta menggunakan perangkat statistik yaitu EViews 12 sebagai alat uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan antara lain, desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *fiscal stress*, sehingga jika kondisi desentralisasi fiskal membaik atau meningkat, maka kondisi *fiscal stress* akan menurun. Belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*, sehingga jika belanja pegawai meningkat, maka *fiscal stress* juga akan meningkat. Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fiscal stress*, yang berarti jika belanja modal meningkat maka *fiscal stress* juga akan meningkat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatkan desentralisasi fiskal dapat membantu mengurangi *fiscal stress*, tetapi peningkatan belanja pegawai dan belanja modal dapat menyebabkan peningkatan *fiscal stress*.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, belanja pegawai, belanja modal, *fiscal stress*

Abstract

This study aims to investigate the effect of fiscal decentralization, employee expenditure, and capital expenditure on fiscal stress in the Provincial Government on the island of Sumatra. The study used 30 samples from 10 provinces on Sumatra Island from 2019 to 2021. The type of data used is secondary data collected through documentation techniques, namely the Budget Realization Report from the "Report on the Results of the Examination of Local Government Financial Statements". The data is downloaded from www.e-ppid.bpk.go.id site. The study used panel data analysis with multiplier regression analysis, and used a statistical tool, EViews 12 as a hypothesis test tool. The results showed several findings, among others, fiscal decentralization has a significant negative influence on fiscal stress, so that if fiscal decentralization conditions improve or increase, fiscal stress conditions will decrease. Employee expenditure has a positive and significant effect on fiscal stress, so if employee expenditure increases, fiscal stress will also increase. Capital expenditure has a positive and significant influence on fiscal stress, which means that if capital expenditure increases then fiscal stress will also increase. Thus, the study concludes that increasing fiscal decentralization can help reduce fiscal stress, but increased employee expenditure and capital expenditure can lead to increased fiscal stress.

Keywords: *fiscal decentralization, employee expenditure, capital expenditure, fiscal stress*

1. PENDAHULUAN

Covid-19 menjadi pandemi yang berdampak serius tidak hanya pada sektor kesehatan namun juga menjalar ke segala sektor, terutama sektor perekonomian. Akibatnya Covid-19 menjadi pandemi yang efeknya luar biasa dan tidak terkendali di seluruh negara. Adanya pandemi ini mengakibatkan defisit

anggaran pemerintah lebih dari 3% dari PDB. Fenomena tersebut diperkuat dengan munculnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, pemerintah menetapkan tingkat defisit anggaran dalam defisit APBN 2022 yang semula sebesar Rp868 triliun atau 4,85% PDB, kemudian diturunkan menjadi Rp840,2 triliun atau 4,5% dari PDB. Tekanan yang terjadi pada masa

pandemi ini juga berasal dari tekanan fiskal pada suatu negara, yaitu adanya tekanan pada APBN yang terus meningkat.

Berikut ini surplus/defisit anggaran seluruh provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2019 ditampilkan dalam tabel 1.

Table 1
Surplus/Defisit Anggaran

Provinsi	Surplus/Defisit
Aceh	- 35.082.483.838,01
Sumatera Utara	- 360.725.070.277,94
Sumatera Barat	- 160.941.676.051,13
Riau	12.841.659.043,27
Jambi	- 249.173.501.676,41
Sumatera Selatan	- 337.332.441.392,18
Bengkulu	- 184.245.577.403,59
Lampung	208.279.549.803,47
Kep. Bangka Belitung	- 81.870.706.189,51
Kep. Riau	285.512.848.164,25

Sumber: www.bpk.go.id, 2019

Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat 7 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yang mengalami defisit. Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak anggaran daripada menerima pendapatan. Apabila defisit terus berlanjut, maka akan berdampak pada meningkatnya utang publik sehingga memperburuk kondisi keuangan pemerintah, hal ini dapat memicu timbulnya potensi *fiscal stress*. Tekanan anggaran dapat muncul sebagai akibat dari penumpukan utang publik, kewajiban kontinjensi yang menjadi biaya fiskal langsung, guncangan pendapatan negatif, atau tekanan pengeluaran terkait demografis yang tidak teratasi. Kendala pembiayaan juga dapat mengecil karena bahwasanya komposisi utang publik menghambat kemampuan pembayaran pemerintah.

Pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera tahun anggaran 2021 mendapati bahwa kewajiban jangka pendek terhadap total kewajiban sangat mendominasi dengan rata-rata rasio sebesar 80,66%. Jika rasio ini terlalu tinggi, maka terdapat resiko suatu negara akan kesulitan untuk membayar kembali kewajiban jangka pendek ketika jatuh tempo tiba. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan keuangan, dan bahkan dapat mengakibatkan kebangkrutan pemerintah. Maka, dengan tingginya rasio kewajiban jangka pendek ini maka resiko *fiscal* yang dihadapi suatu daerah juga semakin tinggi.

Pentingnya penelitian tentang *fiscal stress* di tingkat daerah semakin meningkat, terutama dalam era otonomi daerah di mana diharapkan daerah dapat mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan memberikan layanan publik kepada penduduknya (Firstanto, 2015). Tekanan fiskal merujuk pada kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh individu, organisasi, atau pemerintah, yaitu kondisi di mana tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya.

Menurut (Arnett, 2012) tingkat *fiscal stress* atau tekanan anggaran meningkat karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian, yang tercermin dari peningkatan pendapatan sendiri untuk mendanai berbagai pengeluaran yang diperlukan. Namun dalam memenuhi kewajibannya, nyatanya setiap daerah tentu memiliki potensi, kesiapan, dan kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Beberapa daerah belum mampu menggali potensi daerahnya, namun dituntut menyelesaikan masalah guna meningkatkan kemandirian daerah. Jika tingkat *fiscal stress* tinggi, maka suatu daerah harus lebih optimis dalam mengoptimalkan keuangan daerahnya. Sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat dikurangi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widyahastuti, 2021) disimpulkan bahwa kinerja pemerintah dalam mengurangi tingkat *fiscal stress* dapat diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan desentralisasi fiskal. Menurut (Suwandi, 2015) desentralisasi fiskal merupakan proses pendistribusian anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, seperti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan mendukung fungsi atau tugas pemerintahan yang diberikan. Otonomi daerah yang dilaksanakan saat tingkat kesiapan daerah berbeda menyebabkan timbulnya kesenjangan penerimaan pendapatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mengelola penerimaan daerah dan meningkatkan kualitas pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi

beberapa jenis seperti belanja pegawai dan belanja modal.

Menurut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah), pemerintah mengatur batas belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari APBD, sedangkan belanja modal batas minimalnya yaitu sebesar 40% dari APBD harus dialokasikan.

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada tahun 2021 rata-rata realisasi belanja pegawai di Pulau Sumatera lebih tinggi daripada rata-rata realisasi belanja modal sebesar Rp633.636.248.551,06. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah sebagian besar dialokasikan ke belanja pegawai. Belanja pegawai mencakup gaji, tunjangan, dan biaya lain terkait dengan tenaga kerja pemerintah. Apabila belanja pegawai yang tinggi tidak seimbang dengan kemampuan fiskal pemerintah, maka dapat menyebabkan defisit anggaran yang lebih besar atau mengurangi alokasi dana untuk sektor lain. Akibatnya, akan berujung pada peningkatan tekanan anggaran atau *fiscal stress*.

Penelitian ini akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *fiscal stress* serta mengamati secara simultan bagaimana variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh terhadap *fiscal stress* di Pulau Sumatera Periode 2019-2021. Adanya upaya desentralisasi fiskal yang baik dan pengelolaan belanja yang tepat diharapkan mampu meminimalisir tingkat *fiscal stress*, yaitu dengan mandiri dalam meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan anggaran belanja. Sehingga, penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana tanpa tergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan kondisi Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera terkait masalah diatas, maka penelitian ini difokuskan pada “Determinan *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera”.

2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut (Kawatu, 2019) laporan keuangan pemerintah adalah hak publik yang diberikan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, (Mahmudi, 2016) juga menyatakan bahwa fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk

memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan memeriksa setiap elemen laporan keuangan, membandingkan elemen tertentu dengan elemen lainnya untuk menghasilkan data rasio keuangan, serta memprediksi kemungkinan kondisi di masa mendatang.

Salah satu laporan yang disajikan oleh pemda yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2021) dalam PSAP No. 02 dijelaskan “Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya”. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), perbedaan antara pendapatan dan belanja dicatat sebagai surplus atau defisit. Surplus merujuk pada kelebihan pendapatan dibandingkan belanja selama satu periode anggaran, sedangkan defisit mengacu pada kekurangan pendapatan dibandingkan belanja selama satu periode anggaran. Defisit pada anggaran dapat menunjukkan adanya gejala tekanan anggaran (*fiscal stress*) karena adanya tekanan pada pengeluaran (belanja) yang tidak terpenuhi oleh pendapatan.

2.2 *Fiscal Stress*

Menurut pandangan (Arnett, 2012), *fiscal stress* merupakan kondisi anggaran yang mengalami tekanan karena pendapatan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja. *Fiscal stress* atau tekanan anggaran muncul ketika pengeluaran untuk belanja melebihi pendapatan yang diterima. Kondisi *fiscal stress* ini menyebabkan anggaran pemerintah daerah harus bergantung pada bantuan pemerintah pusat karena tidak mampu untuk membiayai pembangunan daerah secara mandiri.

Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari penelitian (Widyahastuti, 2021) yang mengatakan bahwa Pemerintah daerah yang mengalami *fiscal stress* menandakan bahwa pemerintah daerah tersebut belum sepenuhnya mampu membiayai pembangunan di

wilayahnya. Selain itu, hal ini juga mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah belum efektif dalam memanfaatkan berbagai sumber pendapatan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan belanjanya, sehingga masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

2.3 Desentralisasi Fiskal

Menurut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah”. Peraturan perundangan inilah yang menjadi landasan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang akhirnya berpengaruh pada sistem dan kebijakan pemerintahan di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mulanya dari negara yang menganut sistem sentralisasi hingga menjadi negara dengan sistem desentralisasi. Pelimpahan kewenangan pempus kepada pemda mendukung terjadinya kesenjangan penerimaan, sebab tidak semua daerah siap, baik dari segi manajerial daerah maupun sumber daya daerahnya. (Adriana et al., 2017) menyatakan bahwa dalam mendukung kebijakan pemerintah yang telah berubah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, Pemerintah Daerah harus aktif dalam mengoptimalkan potensi dan kapasitas fiskalnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

H₁ :Desentralisasi Fiskal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

2.4 Belanja Pegawai

Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran), “Belanja Pegawai adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ahsanova,

2019), jika tingkat belanja pegawai semakin tinggi, maka tingkat *fiscal stress* juga akan meningkat.

H₂ :Belanja Pegawai berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

2.5 Belanja Modal

Belanja modal diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa, “Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah untuk memperoleh aset berwujud yang digunakan dalam jangka waktu yang lama dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan”. Menurut (Icih et al., 2021), belanja modal yang merupakan indikator pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi *fiscal stress*, sebab apabila belanja modal meningkat, maka pengeluaran pemerintah juga akan meningkat.

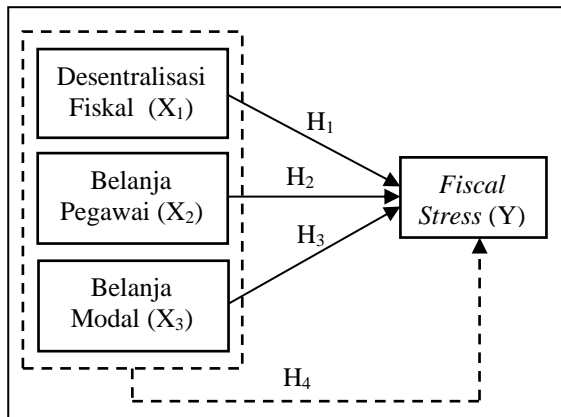
H₃ :Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan pendekatan hubungan kausal. Metode kuantitatif adalah pendekatan yang menggunakan data berupa angka dan melakukan analisis menggunakan statistik. Hubungan kausal mengacu pada hubungan sebab dan akibat di mana terdapat variabel independen (sebab) dan variabel dependen (akibat), dan kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera. Sumber data berasal dari laman E-PPID Pusat BPK RI, yaitu www.e-ppid.bpk.go.id. Jumlah Pemerintah Provinsi yang dijadikan sampel adalah 10 Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera selama 3 tahun anggaran yaitu dari 2019 sampai 2021. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu dengan sampling jenuh (*non-probability sampling*), sehingga terdapat 50 sampel untuk diolah.

Berikut kerangka pemikiran penelitian ini.



Sumber: Data Diolah Penulis

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

3.1 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan regresi data panel yang dijalankan dengan bantuan aplikasi EViews 12. Analisis yang dilakukan meliputi uji regresi data panel dengan penentuan model terbaik, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, dan uji T.

Model persamaan regresi data panel yaitu:

$$FS = \alpha + \beta_1 DF + \beta_2 BP + \beta_3 BM + \epsilon$$

Keterangan :

- FS = *Fiscal Stress*
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi
- DF = Desentralisasi Fiskal
- BP = Belanja Pegawai
- BM = Belanja Modal
- ϵ = error

Menurut (Priyatno, 2022), dalam melakukan estimasi regresi data panel, dilakukan penentuan model terbaik dari ketiga model yang tersedia yaitu, *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, serta *Random Effect Model (REM)*. Pemilihan model dilakukan dengan menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan Uji Langrange Multiplier.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemilihan Model

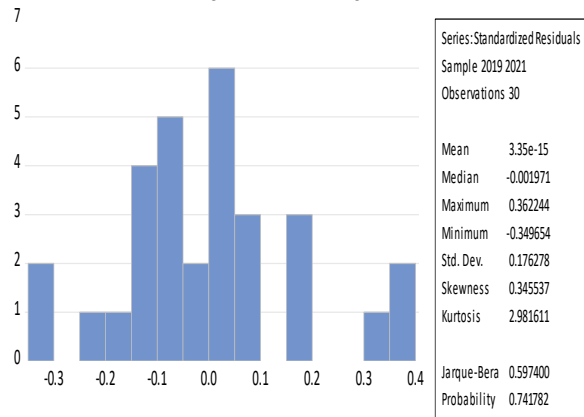
Setelah dilakukan uji pemilihan model untuk menentukan model terbaik diantara ketiga model regresi yang telah diestimasi, hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan *Random Effect Model* terpilih sebanyak dua kali yaitu pada uji Hausman dan uji Langrange Multiplier. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

pendekatan model terbaik untuk menentukan Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2021 adalah **Random Effect Model (REM)**.

4.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Berikut disajikan hasil uji normalitas.



Sumber: Data Diolah dengan EViews 12

Gambar 2

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2, dari hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Jarque-Bera (J-B)* diperoleh nilai probabilitas lebih dari 5% yaitu $0,741782 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asumsi uji normalitas telah terpenuhi, dan tersebut terdistribusi secara normal.

4.2.2 Uji Multikolinearitas

Berikut hasil uji multikolinearitas.

Table 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.993791	5039.236	NA
X1	0.019410	24.27271	1.309257
X2	0.024602	19678.03	4.483062
X3	0.014142	10923.96	4.439048

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12

Hasil uji multikolinearitas dari tabel 2 menunjukkan bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dari ketiga variabel independen (Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal) kurang dari 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi.

4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Berikut hasil uji Heteroskedastisitas menggunakan uji White.

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.499451	Prob. F(9,20)	0.2150
Obs*R-squared	12.08691	Prob. Chi-Square(9)	0.2085
Scaled explained SS	5.988729	Prob. Chi-Square(9)	0.7410

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12

Hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-Squared lebih besar dari 5% yaitu $0,6694 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

4.2.4 Uji Autokorelasi

Berikut hasil uji Autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	2.730750	Prob. F(2,24)	0.0854
Obs*R-squared	5.561326	Prob. Chi-Square(2)	0.0620

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12

Hasil uji autokorelasi menggunakan metode Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Prob. Chi-Square pada Obs*R-Squared lebih besar dari 5% yaitu $0,0620 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model regresi.

4.3 Analisis Regresi Multiplier

Pada pemilihan model, metode *Random Effect Model* terpilih sebanyak dua kali. Maka metode terbaik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*. Berikut hasil regresinya.

Tabel 5
Hasil Regresi Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.358372	3.594917	-0.934200	0.3588
X1	-0.606924	0.168622	-3.599316	0.0013
X2	0.942946	0.144854	6.509621	0.0000
X3	0.187169	0.075712	2.472137	0.0203
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.174150	0.8548
Idiosyncratic random			0.071770	0.1452
Weighted Statistics				
Root MSE	0.070758	R-squared	0.758949	
Mean dependent var	6.717537	Adjusted R-squared	0.731135	
S.D. dependent var	0.146583	S.E. of regression	0.076007	
Sum squared resid	0.150202	F-statistic	27.28695	
Durbin-Watson stat	1.489803	Prob(F-statistic)	0.000000	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.905524	Mean dependent var	29.02104	
Sum squared resid	0.901146	Durbin-Watson stat	0.248319	

Sumber: Data Diolah dengan EViews 12

Model estimasi yang diperoleh dari hasil regresi diatas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = -3.358372 - 0.606924X_1 + 0.942946X_2 + 0.187169X_3 + e$$

Maka, dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar -3.358372 berarti jika Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal bernilai 0 (nol), maka nilai *Fiscal Stress* mengalami penurunan sebesar -3.358372 atau 335,8%

- dan sisanya variabel Y akan dipengaruhi oleh variabel lain.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel Desentralisasi Fiskal (β_1) bernilai negatif sebesar -0.606924. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan Desentralisasi Fiskal sebesar 1 satuan atau 1% (sementara variabel lain tetap konstan), akan menyebabkan penurunan *Fiscal Stress* sebesar 0.606924 atau sekitar 60,9%.
 - c. Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Pegawai (β_2) bernilai positif sebesar 0.942946. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan atau 1% (sementara variabel lain tetap konstan), akan menyebabkan penurunan *Fiscal Stress* sebesar 0.942946 atau sekitar 94,2%.
 - d. Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal (β_3) bernilai positif sebesar 0.187169. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 satuan atau 1% (sementara variabel lain tetap konstan), maka akan menyebabkan penurunan *Fiscal Stress* sebesar 0.187169 atau sekitar 18,7%.

4.4 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Berdasarkan tabel 5, diperoleh hasil uji koefisien determinasi dengan nilai *adjusted R²* sebesar 0.731135. Hal ini berarti 73,1% dari variabel dependen atau *Fiscal Stress* dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model (Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal). Sisanya sebesar 22,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.5 Uji Hipotesis

4.5.1 Uji F

Berdasarkan tabel 5, nilai F_{hitung} diketahui sebesar 27.28695 dengan probabilitas sebesar 0.000000. Nilai F_{hitung} tersebut dibandingkan dengan nilai F_{tabel} , yang diperoleh dari tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df_1 (jumlah variabel-1) = 3, dan df_2 (n-k-1) atau 30-3-1 = 26 (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), maka diperoleh F_{tabel} senilai 2,975. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} lebih besar dari nilai F_{tabel} yaitu 27.28695 > 2.975, dan dengan probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu 0.000000 < 0.05. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak yang artinya hipotesis penelitian H_4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

variabel independen, yaitu Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

Hasil uji F (uji simultan) memberikan informasi penting bagi peneliti dan pemerintah daerah mengenai seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress*, sehingga Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat mengambil langkah yang tepat untuk memaksimalkan faktor-faktor tersebut.

4.5.1 Uji T

Jika probabilitas (signifikansi) kurang dari 0,05 (α) atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5% atau 0,05 maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05/2 = 0,025 (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ atau 30-3-1=26, dan hasil yang diperoleh untuk t_{tabel} adalah 2,056. Berdasarkan hasil pengujian dari tabel 5, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel Desentralisasi Fiskal (X_1) memiliki nilai t_{hitung} negatif sebesar 3,599316. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,599316 > 2,056) dan nilai probabilitas 0,0013 < 0,05. Dari hasil ini berarti variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera.
 H_2 : H_0 ditolak, H_a diterima.
2. Variabel Belanja Pegawai (X_2) memiliki nilai t_{hitung} positif sebesar 6,509621. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (6,509621 > 2,056) dan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Dari hasil ini berarti bahwa variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera.
 H_3 : H_0 ditolak, H_a diterima.
3. Variabel Belanja Modal (X_3) memiliki nilai t_{hitung} positif sebesar 2,472137. Hasil penelitian menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,472137 > 2,056) dan nilai probabilitas 0,0203 < 0,05. Dari hasil ini berarti bahwa variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera.
 H_3 : H_0 ditolak, H_a diterima.

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Desentralisasi Fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Hal ini terlihat dari tabel 5 dan dari hasil uji parsial menggunakan uji T, dimana variabel Desentralisasi Fiskal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,599316 > 2,056$) dan nilai probabilitas $0,0013 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Desentralisasi Fiskal berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera.

Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, semakin baik desentralisasi fiskal maka *fiscal stress* akan menurun. Pengaruh negatif dari desentralisasi fiskal dapat menjadi upaya Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dalam mengatasi *fiscal stress*. Hal ini dikarenakan pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera, derajat desentralisasi fiskal memiliki rata-rata sebesar 34,9%, dimana nilai tersebut masih dikategorikan “sedang” dalam skala interval derajat desentralisasi fiskal. Namun pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan agar kemampuan keuangan daerah lebih kuat untuk mengatasi *fiscal stress* dikarenakan masih terdapat persentase desentralisasi fiskal yang rendah, contohnya persentase di Provinsi Aceh pada tahun 2019 yaitu hanya sebesar 17% dan dikategorikan kurang. Artinya pemerintah daerah belum begitu mampu secara mandiri dalam memaksimalkan pendapatan yang bersumber asli dari daerah tersebut. Jika pendapatan suatu daerah semakin rendah maka resiko terjadi *fiscal stress* akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Iciah et al., 2021), (Adriana et al., 2017), dan (Ahsanova, 2019) yang juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif secara parsial terhadap *fiscal stress*. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyahastuti, 2021), yang menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap *fiscal stress*, sebab pada penelitiannya nilai desentralisasi fiskal mengalami kenaikan yang menunjukkan adanya peningkatan dalam kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola

keuangannya, meskipun belum sepenuhnya mampu menanggulangi kondisi *fiscal stress*.

4.6.2 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap *Fiscal Stress*

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa Belanja Pegawai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Hal ini terlihat dari tabel 5 dan dari hasil uji parsial menggunakan uji T, dimana variabel Belanja Pegawai memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,509621 > 2,013$) dan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Belanja Pegawai berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera.

Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, jika belanja pegawai meningkat maka *fiscal stress* juga akan meningkat. Pengaruh positif dari belanja pegawai dapat menjadi indikator tingkat *fiscal stress* sehingga alokasi belanja pegawai dapat dioptimalkan lagi untuk meminimalisir tingkat *fiscal stress* yang tinggi. Penyebabnya yakni karena alokasi belanja pegawai dalam belanja daerah pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera telah mencapai tingkat yang cukup tinggi yaitu dengan rata-rata sekitar 27,62%. Artinya, belanja pegawai berkontribusi banyak dalam pengeluaran belanja daerah sehingga dapat mempengaruhi tekanan anggaran atau *fiscal stress*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ahsanova, 2019) yang juga menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif terhadap *fiscal stress*, dan menunjukkan bahwa semakin tinggi belanja pegawai, akan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat *fiscal stress* pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

4.6.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Fiscal Stress*. Hal ini terlihat dari tabel 5 dan dari hasil uji parsial menggunakan uji T, dimana variabel Belanja Modal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,472137 > 2,056$) dan nilai probabilitas $0,0203 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Belanja Modal berpengaruh positif

secara signifikan terhadap *Fiscal Stress* di Pulau Sumatera.

Hasil ini menunjukkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh, jika belanja modal naik maka tingkat *fiscal stress* juga akan naik. Pengaruh positif dari belanja modal dapat menjadi indikator tingkat *fiscal stress* sehingga alokasi belanja modal dapat dioptimalkan lagi untuk meminimalisir tingkat *fiscal stress* yang tinggi. Hal ini dikarenakan alokasi belanja modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera periode 2019-2021 berkontribusi dengan rata-rata sebesar 17% terhadap total belanja daerah. Seperti yang dinyatakan (Iciah et al., 2021), pada saat belanja modal rendah maka tekanan anggaran di daerah tersebut juga rendah sehingga resiko terjadinya *fiscal stress* menurun. Sebagai contoh, belanja modal Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2020 hanya Rp 315.397.833.094,64 lebih rendah jika dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp 441.201.203.550,86 pada 2019, hal ini diikuti dengan rendahnya *fiscal stress* di tahun 2020 sebesar Rp1.891.737.761.549,49 dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1.949.375.270.512,51 pada 2019. Semakin rendah tekanan anggaran pada suatu daerah, maka semakin baik pemerintah daerah tersebut mengelola APBD-nya.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Iciah et al., 2021) dan (Sibuea, 2017) yang juga menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap *fiscal stress*. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Aman, 2017), (Widyahastuti, 2021), (Ahsanova, 2019), (Firstanto, 2015) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap *fiscal stress*.

4.6.4 Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress*

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan menggunakan uji F, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 27.28695 dengan probabilitas 0,000000. Sedangkan nilai F_{tabel} diketahui sebesar 2,975. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} memiliki nilai yang lebih besar dari nilai F_{tabel} ($27.28695 > 2.975$) dan probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% yaitu $0.000000 < 0.05$. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak yang artinya hipotesis penelitian H_a

diterima. Kesimpulannya, variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *Fiscal Stress*.

Hal ini mendukung teori yang dijelaskan oleh Iciah et al (2021) bahwa setiap daerah dituntut untuk bisa mandiri dalam mengelola urusan daerahnya termasuk mengelola sumber daya dan membuat laporan keuangan. Daerah yang memiliki sumber pendapatan yang memadai cenderung memiliki tingkat *fiscal stress* yang lebih rendah. Selain itu, teori dari (Ahsanova, 2019) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat belanja pegawai, semakin tinggi tingkat *fiscal stress*. (Sibuea, 2017) juga menyatakan bahwa *fiscal stress* yang tinggi menunjukkan upaya daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. dan alokasi belanja untuk modal dapat berkontribusi dalam hal ini.

Berdasarkan teori pendukung tersebut, *fiscal stress* dapat mengalami kenaikan atau penurunan karena pengaruh secara simultan dari Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai dan Belanja Modal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan desentralisasi fiskal yang baik, dan pengelolaan pengeluaran belanja yang tepat, kondisi *fiscal stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera dapat teratasi.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera tahun 2019-2021, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Desentralisasi Fiskal (X_1) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Fiscal Stress*.
2. Belanja Pegawai (X_2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Fiscal Stress*.
3. Belanja Modal (X_3) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Fiscal Stress*.
4. Secara simultan, Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.

Dengan demikian, temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan Desentralisasi Fiskal dapat mengurangi tingkat

Fiscal Stress, sementara peningkatan Belanja Pegawai dan Belanja Modal dapat meningkatkan tingkat *Fiscal Stress*. Selain itu, variabel-variabel tersebut juga berpengaruh secara simultan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan pengujian maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali serta mengoptimalkan sumber penerimaan yang menjadi potensi daerah seperti pendapatan BLUD dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah. Sehingga, dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang dalam hal ini dapat mengurangi gejala *fiscal stress* karena keuangan daerah yang telah mandiri.
 - b. Pemerintah provinsi sebaiknya memastikan bahwa pengeluaran belanja pegawai dan belanja modal tidak melebihi kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan. Maka dari itu, pemerintah daerah diharapkan mengatur pengalokasian APBD secara tepat dalam mengelola belanja pegawai, dengan memprioritaskan belanja yang dibutuhkan dalam suatu daerah sehingga gejala *fiscal stress* dapat dikurangi.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam ruang lingkup analisis penelitian agar dapat mengidentifikasi permasalahan utama pada daerah, seperti ke lingkup daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti Diversifikasi Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana, M., Basri, Y. M., & Indrawati, N. 2017. Variabel Yang Mempengaruhi

Fiscal Stress Di Kabupaten/Kota Se-Propinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 25: 45–60.

Ahsanova, A. 2019. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai dan Belanja Modal terhadap Fiscal Stress. *Skripsi*. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pendidikan Indonesia.

Aman. 2017. Pengaruh Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Belanja Modal, Pertumbuhan Dana Perimbangan dan Pertumbuhan PDRB terhadap Fiscal Stress pada Pemerintahan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Arnett, S. B. 2012. Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of Measures and Responses. *Disertation*. Doctor of Philosophy in Public Policy Georgia. Georgia State University.

Basuki, A. T., & Prawoto, N. 2016. *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews*. Jakarta: Rajawali Pers.

Firdaus, M. 2018. *Aplikasi Ekonometrika untuk Data Panel dan Time Series*. Bogor: Penerbit IPB Press.

Firstanto, R. 2015. Analisis Pengaruh Pertumbuhan PAD, PDRB, dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.

Icih, Kurniawan, A., & Fadillah, R. 2021. The Influence of Local Revenue, Capital Expenditure, Economic Growth of GDP, General Allocation Funds, Fiscal Decentralization and Diversification of Regional Income on Fiscal Stress. *Journal of Accounting for Sustainable*, 03(32): 34–53.

Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2021. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: KSAP.

Lupiyoadi, R., & Ikhsan, R. B. 2015. *Praktikum Metode Riset Bisnis*. Jakarta: Penerbit

Salemba Empat.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Klasifikasi Anggaran.

Priyatno, D. 2022. *Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS & Analisis Regresi Data Panel Dengan Eviews*. Yogyakarta: Cahaya Harapan.

Sibuea, H. C. 2017. Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pemerintah Kabupaten Di Indonesia. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Sriwijaya.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suwandi. 2015. *Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Widyahastuti, A. 2021. Pengaruh Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Fiscal Stress Di Provinsi Sumatera Selatan. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Politeknik Negeri Sriwijaya.